



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding
Senaskah
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

Sinergitas Birokrasi Dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan Pariwisata Kawasan Kasultanan Banten Lama Kota Serang

Ipah Ema Jumiati¹, Yedi Rusyadi²

^{1,2}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Kota Serang, Indonesia

Email Korespondensi: ipah.ema@untirta.ac.id

ABSTRACT

The important value of regional tourism in supporting the preservation of customs, culture, environmental sustainability indicates that there is a need for division of bureaucratic roles between related sectors in developing regional tourism. Presumably the area of the Old Banten Sultanate is one of the historical icons of Banten Province which is believed to be able to contribute significantly to regional income, therefore it requires innovation. The success of increasing competitiveness and quality of tourist attraction objects still depends on the seriousness of the local government and is supported by high public awareness of the importance of the presence of tourist objects around it. Related to this, to develop the tourism potential of the Old Banten Sultanate, the role of local governments, institutions, the private sector and the local community is also needed to be responsible for developing and managing tourism potential in Banten through the creative economy. This study uses a qualitative descriptive method with the consideration that this method presents directly the nature of the relationship between researchers and informants, so that it is expected to obtain a complete picture of the phenomenon to be studied, focusing on the description of bureaucratic synergy between government, creative economy actors, tourism actors, and community institutions in encouraging the acceleration of sustainable creative economic development for tourism in the Banten Lama sultanate area, Serang City.

Keywords: *Bureaucracy, Creative Economy, Synergy, Tourism*

PENDAHULUAN

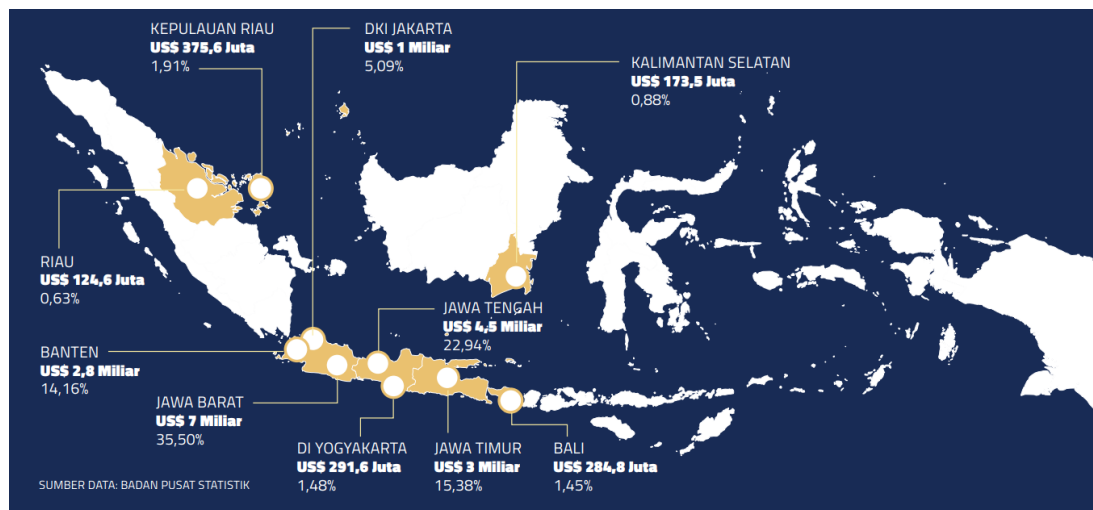
Ekonomi kreatif tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi tetapi juga juga mempromosikan aspek non-ekonomi, nasional dan negara kondisi untuk mempromosikan citra dan identitas nasional dan mempromosikan sumber daya sumber daya terbarukan dan mempromosikan pengembangan inovasi dan kreativitas domestik (Setyadi, Sugeng. 2020:120). Meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian negara perlu direncanakan melalui program strategis jangka panjang dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif terpadu dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah. Di samping itu, perencanaan program strategis harus didukung oleh kreativitas dan dinovasi sumber daya manusia

adalah kekuatan untuk mengembangkan kreativitas dan bisnis harus dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Ekonomi kreatif terkait dengan perencanaan pembangunan yang terpusat serta daerah.

Dampak perkembangan ekonomi kreatif akan berpengaruh kondisi sosial masyarakat, kualitas hidup masyarakat serta peningkatannya distribusi kesejahteraan sosial. Perpres 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Nasional Pengembangan Ekonomi Kreatif 2018-2025, menggambarkan ekonomi kreatif dalam hal mengungkapkan nilai tambah ide-ide mengandung keaslian, tercipta dari kreativitas kekayaan intelektual berdasarkan pengetahuan, keterampilan, budaya dan Teknologi adalah kekayaan intelektual. Daya saing tidak akan dinyatakan dalam bentuk kuantitas produk tetapi dalam bentuk kualitas produk. Produk yang berkualitas dapat dicapai melalui citra, dan penciptaan produk yang inovatif dapat membedakannya dengan produk dari daerah lain. Gagasan atau ide adalah produk ekonomi berwujud yang sangat penting, lebih penting model objek ekonomi lainnya. Kreativitas adalah semangat sumber utama ide dan refleksi. Pada akhirnya, kesulitan mungkin terjadi diselesaikan dengan mengubahnya menjadi peluang ekonomi yang dibuat oleh platform inovatif ini. Sedangkan produk inovatif bisa tercipta dari kreativitas sumber daya manusia yang luar biasa.

Ekonomi kreatif menjadi fokus pemerintah Indonesia dengan keyakinan yang dapat menjadi tumpuan perekonomian di masa depan. Tumbuhnya ekonomi kreatif diawali dengan diterbitkannya pedoman Presiden Nomor 6 Tahun 2009 terkait pengembangan ekonomi kreatif. Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan dibentuknya Badan tersebut. Ekonomi Kreatif Adopsi Perpres No 6 Tahun 2015, untuk memenuhi persyaratan yang kompleks dari proses pembangunan Peraturan Presiden ekonomi kreatif No. 6 Tahun 2015 sebagaimana direvisi disahkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015.

Pada gambar 1. tergambar bahwa Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang berkontribusi terhadap ekspor ekonomi kreatif secara nasional. Perkembangan nilai ekspor ekonomi kreatif Provinsi Banten selama tahun 2018-2019 cenderung stabil dan dapat dipersepsikan bahwa Provinsi Banten mampu melakukan pengembangan ekonomi kreatif secara signifikan.



Gambar 1 Ekspor Ekonomi Kreatif di Indonesia 2018-2019 (sumber: Badan Pusat Statistik)

Provinsi menduduki posisi ke-4 setelah Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Provinsi Banten mempunyai nilai ekspor ekonomi kreatif secara nasional yaitu US\$ 2,8 Miliar atau 14,16% terhadap kontribusi keseluruhan ekspor Ekonomi Kreatif Indonesia. Nilai ekspor ekonomi kreatif Provinsi Banten berdasarkan sub sektor pada tahun 2018 sampai dengan 2019 secara pertumbuhan didominasi oleh lima sub sektor diantaranya: sub sektor kriya, kuliner, fashion, penerbitan dan sub sektor seni rupa.

Dalam perjalanan mengembangkan ekonomi kreatif di kota Serang menghadapi berbagai permasalahan yang pada hakekatnya adalah ekonomi kreatif usaha mikro kecil tidak bisa mandiri, perlu industri lainnya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi perusahaan ciptaan ini. Sebuah industri dengan potensi besar. Industri pariwisata adalah mesin utama yang dapat menyediakan infrastruktur yang berbeda dan pangsa pasar yang besar. Nah dari syaratnya, hal ini dapat dilakukan dalam kemitraan simbiosis mutualisme (saling menguntungkan/kebutuhan bersama) antara dua pihak bidang.

Pengembangan industri pariwisata didasarkan pada kinerja UU No 10 Tahun 2009 diterapkan berdasarkan asas kepentingan, kekeluargaan, keadilan dan persamaan, keseimbangan, kemandirian, keberlanjutan, partisipasi, keberlanjutan, demokrasi, kesetaraan dan kesatuan. Prinsip pengembangan pariwisata dapat dicapai melalui melaksanakan rencana pengembangan yang sesuai keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia dalam memanfaatkan obyek wisata sebagai sarana mewujudkannya. Kebutuhan hidup untuk perjalanan. Banten adalah salah satu provinsi ada tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi seperti pantai Anyer, Tanjung Lesung, Pantai Carita, Pulau Umang, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan lokasi lainnya, selain tempat wisata alam, Banten juga memiliki tempat wisata sejarah yang sangat terkenal di seluruh Indonesia, khususnya wilayah Kesultanan Banten.

Wilayah Kesultanan Banten atau lebih dikenal Banten Lama merupakan cagar budaya perkotaan di kota Serang Provinsi Banten. Wilayah Kesultanan Banten merupakan bagian dari sejarah. Sejarah Munculnya Provinsi Banten. Daerah ini adalah sisa-sisa kejayaan Kerajaan Islam Banten, berdiri sejak tahun 1500. Daerah ini, pada saat itu memainkan peran penting dalam mempercepat pembangunan daerah ini adalah pusat kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di

dekatnya daerah Banten Lama. Kawasan Banten lama merupakan kawasan yang strategis. Provinsi dari segi sosial budaya dan difungsikan sebagai kawasan wisata berdasarkan Pasal 64 Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 2 Tahun 2011 RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030. Destinasi di wilayah Banten Lama juga ditetapkan sebagai situs warisan/dilindungi UU Cagar Budaya No 5 Tahun 1992. Faktor itu sebabnya kawasan Kesultanan Banten lama memiliki nilai sejarah sangat tinggi.

Fenomena banyaknya destinasi wisata baru terus bermunculan itu tidak dilakukan sebagai bentuk kreativitas, melainkan sebagai apresiasi. Sangat sering dijumpai destinasi wisata yang infrastrukturnya tidak sesuai untuk dikunjungi penumpang Kerugian utama dari konsep objek wisata berikut ini adalah Kurangnya kegiatan promosi dan tidak ada kontak dengan industri kreatif produksi suvenir. Turis masa depan tidak akan memiliki pengalaman ini, Eksotik malah membuat pengalaman buruk (souvenir buruk), Jadi mereka hanya datang dan pulang dengan enggan. Menginformasikan/mendorong teman dan kerabat untuk mengunjungi tempat wisata yang dia kunjungi. Meskipun di sisi lain potensi dampak ekonomi dari peningkatannya. Kunjungan wisatawan ke kawasan Banten lama bisa dihitung berapa pengeluaran wisatawan yang besar. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa besaran pengeluaran pariwisata didasarkan pada neraca satelit Pariwisata Daerah yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi wisatawan pertotal kunjungan tahun 2019 Rp. 386.158,39 untuk konsumsi wisatawan domestik dan Rp. 1.144.607,88 untuk konsumsi wisatawan domestik di Banten.

Namun melihat kondisi yang terjadi di Kota Serang dan kelemahan pengembangan industri kreatif, terlihat beberapa permasalahan internal yang menjadi sorotan:

Pertama, keberadaan industri kreatif sebagai talenta baru dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi dan bahkan mendorong daya saing di dalam distrik-distrik di. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Serang merupakan sebuah lembaga masyarakat harus mampu menciptakan ketertiban umum (regulasi) dari pihak pelaku industri kreatif.

Kedua, bentuk ide kreatif dan inovatif masyarakat produk kreatif yang bernilai ekonomis belum sepenuhnya dipahami bahwa masyarakat pelaku industri kreatif menghargai sesuatu budaya memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berpuas diri hanya jika itu adalah mahakarya hanya bisa dijual, yang melemahkan daya saing produk kreatif Manfaat yang langsung dirasakan, sebesar apapun hambatanya, dan apresiasi para pelaku industri kreatif hampir tidak menjadi persoalan sebagian besar masyarakat.

Ketiga, faktor eksternal menghambat pertumbuhan dan berkembangnya industri kreatif di Kota Serang dikarenakan kurangnya fasilitas prasarana dan fasilitas kursus kreatif (creative center).

Keempat, kurangnya pembiayaan (modal) menjadi penyebabnya ketidaksesuaian sistem keuangan dengan karakteristik ekonomi kreatif yang biasanya tidak bankable, high risk, high yield, cash flow cukup berfluktuasi, seperti halnya aset tidak berwujud.

Kelima, cara yang lemah untuk memasarkan dan menjual produk dan jasa layanan kreatif yang lebih dekat dengan konsumen, tetapi masih jauh dari jangkauan Teknologi informasi yang dapat lebih mudah menyenangkan konsumen dapatkan produk dan layanan kreatif.

Koordinasi efektif yang buruk antar pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk asosiasi perangkat daerah Kota Serang. Penanggung jawab pemangku kepentingan bisnis/swasta, komunitas, media dan peneliti yang menjadi tulang punggung pelaksanaan pembangunan ekonomi kreatif. Jadi sebagai bagian dari memerangi setiap masalah yang muncul, koordinasi antar elemen menjadi keharusan dan keharusan. Sinergi pemangku kepentingan sebagai alternatif dianggap

mampu mendeteksi kecepatan dan eksekusi program Pemerintah. Kemudian ada sinergi antara pihak-pihak yang terlibat. Keniscayaan dalam konteks upaya pengembangan industri kreatif sejajar dengan kerangka pembangunan industri pariwisata daerah Kesultanan Kota Serang, Banten. konteks sinergis di pembangunan ekonomi berarti keterpaduan antara unsur-unsur ekonomi elemen kreatif dan pariwisata yang dapat mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan daerah. Menurut teori sinergi James AF Stoner dan Charles Wankel (1986:44) mendefinisikan sinergi sebagai keadaan di mana keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Sinergi aktor-aktor yang berkepentingan adalah sebuah proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan Pada Fakta Dan Fenomena Yang Telah Penulis Deskripsikan Sebelumnya, Maka Persoalan Mengenai Sinergitas Pemangku Kepentingan Memiliki Urgensi Yang Penting Untuk Dilakukan Kajian Secara Lebih Mendalam Dalam Kerangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kawasan Kesultanan Banten. Maka Dari Itu, Penulis Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Yang Berjudul “Sinergitas Birokrasi Dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan Pariwisata Kawasan Kasultanan Banten Lama Kota Serang”.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah seperti prosedur penyelidikan dilakukan. Desain penelitian ini sering mengacu pada metode dan teknik penelitian, sedangkan ketiganya memiliki ciri khas tersendiri. Karena ketiga hal tersebut terkait dan sulit dipisahkan. metode penelitian untuk berbicara tentang bagaimana sesuatu dilakukan. Penelitian sedangkan metode penelitian adalah tentang alat-alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sinergi birokrasi untuk percepatan pengembangan ekonomi kreatif pariwisata berkelanjutan di Kesultanan Banten Lama Kota Serang. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana organisasi perangkat daerah di Provinsi Banten dan organisasi perangkat daerah di kota Serang bersinergi sebagai pengambil keputusan untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kesultanan Banten. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami. Dalam penelitian kualitatif, instrumen memainkan peran kunci. Oleh karena itu penelitian harus memiliki teori dan teori informasi yang komprehensif untuk memungkinkan mereka untuk mengajukan pertanyaan, menganalisis dan konstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Mempelajari kualitatif digunakan ketika masalahnya tidak jelas untuk dijelaskan makna tersembunyi, pemahaman tentang interaksi sosial, kembangkan teori untuk memastikan keakuratan data. Mempelajari. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyelidiki menemukan, menggambarkan dan menggambarkan kualitas atau keistimewaan pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau dijelaskan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam metode penelitian kualitatif yang paling penting terdiri dari memahami fungsi dan makna fenomena sosial perspektif topik penelitian. Alasan mengapa peneliti menggunakan metode tersebut penelitian kualitatif adalah sifat dari masalah yang sedang dipelajari penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memahami sesuatu dibaliknya fenomena yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banten merupakan provinsi yang berada di ujung Barat Pulau Jawa, yang secara administratif berdiri sebagai provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010). Wilayah Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur dengan luas wilayah 9.160,70 km² terdiri atas 4 kota, 4 kabupaten, 155 kecamatan, 313 kelurahan, dan 1.238 desa.

Banten juga disebutkan dalam laporan perjalanan Tome Pires (1513) adalah salah satu pelabuhan sibuk Kerajaan Sunda. Banten adalah kota niaga yang bagus, letaknya di pinggir sebuah sungai yang diperintah oleh seorang syahbandar. Kesaksian Tome Pires ini bisa dijadikan petunjuk yang dimiliki kota Banten berperan sebelum berdirinya Kesultanan Banten. Bahkan berbasis penemuan prasasti tersebut, juga disebutkan dalam prasasti Kebon Kopi di daerah tersebut. Menandakan keberadaan kerajaan Banten Girang pada tahun 932 M (Boedhihartono dkk, 2009: 140). Dalam cerita lokal, nama Banten paling awal disebut dalam naskah Carita Parahiyangan, ditulis pada tahun 1580, dalam manuskrip ini disebutkan tempat yang disebut "Wahanten Girang" bisa dikaitkan dengan nama Banten.

Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam sebelumnya didirikan di provinsi Banten, Indonesia. Kerajaan ini ada sekitar tahun 1526, ketika kerajaan Demak memperluas pengaruhnya di pantai barat pulau Jawa, menaklukkan sebagian area gerbang, lalu gunakan sebagai basis sektor militer dan komersial. Sebelum ada bentuk kesultanan, wilayah Banten termasuk bagian dari kerajaan Sunda Pajajaran. Agama resmi kerajaan pada waktu itu adalah Hindu. Di atas awal abad ke-16 M, penguasa Banten adalah Raja Pucuk Umun dan seorang putra bernama Prabu Seda, dengan pusatnya Administrasi di Banten Girang (Banten Hulu) dalam. Dan saat itu laman Surosowan (Banten Lor) hanya aktif sebagai kota pelabuhan.

Pada penelitian ini, daerah tersebut dijadikan sebagai lokasi penelitian merupakan kawasan Banten Lama yang merupakan bagian dari wilayah tersebut Desa Banten, Kabupaten Kasemen. Kelurahan Banten 107 secara geografis terletak pada 5° 50' Lintang Selatan - 6° 3' Lintang Selatan dan 106° 9' Bujur Timur - 106° 11' Bujur Timur. tipe medan di wilayah Banten Lama sebagian besar berupa daratan memiliki ketinggian rata-rata 500 hingga 700 m di atas permukaan laut curah hujan ± 7,52 mm/tahun. Berdasarkan sistem zonasi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 437/Kep.160-Huk/2018 Tanggal 24 Mei 2018 yang menetapkan sistem zonasi Kawasan Cagar Budaya Kasultanan Banten (Banten Lama) dengan luas keseluruhan seluas 926,94 (sembilan ratus dua puluh enam koma sembilan puluh empat) hektar yang terdiri atas Kawasan Inti seluas 172,58 (seratus tujuh puluh dua koma lima puluh delapan) hektar dan Kawasan Penyangga seluar 754,36 (tujuh ratus lima puluh empat koma tiga puluh enam) hektar. Kawasan Banten Lama terletak pada Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang dengan wilayah batas administrasi, sebagai berikut: Utara : Laut Jawa Selatan : Kelurahan Margaluyu dan Kasunyatan, Kecamatan Serang, Kota Serang Barat : Kelurahan Pamengkang, Kecamatan

Karangantu, Kabupaten Serang Timur : Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang



Gambar 2 Peta Batas dan Zonasi Kawasan Inti (sumber: Keputusan Gubernur Banten Nomor 437/Kep. 160-Huk/2018)

Wilayah Kesultanan Banten dulunya merupakan sisa-sisa sejarah kota kuno Banten sebagai pusatnya di bawah kekuasaan Kesultanan Banten. Jadi daerah ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya yang dilindungi oleh UU-RI No. 5 tahun 1992, pada benda cagar budaya. Tak hanya itu, kawasan Banten Lama merupakan kawasan strategis provinsi dari segi sosial budaya berfungsi sebagai kawasan wisata menurut Pasal 64 Peraturan ini Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten tahun 2010-2030. Kota tua Banten punya mendapat dukungan sebagai salah satu tujuan wisata Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Presiden Negara Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional 2010-2025. Kawasan ini juga merupakan kawasan strategis dari segi pandang manfaat sosial dan budaya (RTRW Provinsi Banten 2010-2030). Jadi ada rencana dari pemerintah provinsi serta pemerintah kota untuk menghidupkan kembali Banten lama.

Kawasan Banten Lama memiliki potensi cagar budaya sangat beragam, dari benda, bangunan, struktur hingga situs. Selain itu, kawasan Banten Lama memiliki tradisi lokal berupa kegiatan ziarah menjadi ciri budaya di wilayah tersebut. Kawasan Cagar Budaya Kerajaan Banten terletak di dalamnya situs bersejarah atau situs arkeologi berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten Nomor 437/Kep.160-Huk/2018 antara lain Masjid Banten, Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, Benteng Spellwijk, Pelabuhan Karangantu, Situ Tasikardi dan Vihara Avalokiteshvara.

Namun tergantung waktu dalam kaitannya dengan keadaan daerah Banten Lama saat itu mulai membiarkan pembangunan daerah tidak tersentuh hari demi hari, makna kawasan itu kabur dan berubah untuk membuat artefak sejarah dari wilayah Banten lama menyedihkan dan tidak nyaman. Kawasan Banten lama kini landai diabaikan, meninggalkan kualitas fungsional dan kerusakan fisik di dalam distrik-distrik di. Kawasan Banten lama telah banyak berubah fungsi. Pemukiman kumuh dan pertumbuhan sektor komersial kawasan tersebut menjadi semakin

informal, dengan memudarnya arti penting kawasan Banten lama. Ditambahkan ke ini adalah ketidakcocokan fungsi di setiap gedung di kabupaten Banten lama seperti Keraton Surosowan dan Benteng Spellwijk. Kondisi Jika tidak ditangani, itu menjadi ancaman bagi keberlanjutan Cagar budaya di kawasan Banten lama. Unik Warisan budaya diselamatkan melalui tindakan penataan kawasan melalui program revitalisasi.



Gambar 3 Kesultanan Banten Sebelum di Revitalisasi

(sumber: <https://dynamic-media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-o/0b/f2/70/6d/menara.jpg?w=500&h=-1&s=1>)

Perbaikan kawasan wisata budaya lama Banten merupakan program prioritas Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyisakan anggaran hampir Rp 300 miliar. termasuk CPR kerjasama antar berbagai pihak yaitu Pemerintah Provinsi Banten, Balai Kota dan Perlindungan Cagar Budaya Kota Serang (BPCB) Pemerintah Provinsi Banten dan Kota Serang dan Pemerintah Kota Serang Susunan dan Tata Kerja Kode Wilayah Banten Lama :430/MoU.4-Huk/2017, nomor:430/718-Setda/2017 dan nomor: 516/MoU.24-Huk/2017. Selain pembangunan infrastruktur, ada juga proyek revitalisasi. Penataan pedagang di Kesultanan Banten lama. Lagi sebanyak 700 Pedagang Kaki Lima (PKL) terdampak program tersebut. Revitalisasi, Kota Serang dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten bermaksud membangun 1.000 kios untuk PKL . Kesultanan Banten juga menawarkan wisata. Pendidikan karena ada museum situs arkeologi Banten lama sebagai tempat pengetahuan sejarah yang mencatat koleksi barang koleksi yang sangat beragam mulai dari dokumen, benda berbagai bentuk dan benda bersejarah.



Gambar 4 Kesultanan Banten Setelah di Revitalisasi (<https://www.tangerangekspres.co.id/wp-content/uploads/2020/11/BANTEN-LAMA.jpg>)

Bangunan cagar budaya yang berada pada Kawasan Kasultanan Banten sudah berumur 50 tahun keatas. Berikut merupakan bangunan cagar budaya yang terdapat pada Kawasan Kasultanan Banten dan sudah ditetapkan oleh Undang – undang Cagar Budaya Tahun 1998 sebagai bangunan cagar budaya yang berada pada Kawasan Kasultanan Banten: a) Istana Keraton Surosowan b) Istana Keraton Kaibon c) Masjid Agung Banten d) Vihara Avalokitesvara e) Benteng Spellwijk f) Museum Situs.

Stakeholder atau lebih dikenal Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang didukung diperlukan untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. Stakeholder melihat bahwa organisasi dan lingkungannya ada interaksi yang kompleks antara keduanya dan dinamis. Hubungan bisnis yang kuat, organisasi dan semakin baik lingkungan, semakin baik bisnisnya dan sebaliknya semakin buruk hubungan bisnisnya semakin sulit untuk mencapai tujuan bersama sepakat aspek yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara pemangku kepentingan didasarkan pada durasi kepercayaan, rasa hormat, dan kerja sama.

Stakeholders dalam kegiatan pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kasultanan Banten dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok antara lain:

1. *Stakeholders Primer*

Pemangku kepentingan utama adalah pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung, baik dampak positif maupun dampak negatif rencana dan memiliki hubungan kinerja langsung dengan kegiatan ini, termasuk orang-orang yang terlibat PKL dan pedagang di sekitar Kesultanan Banten.

2. *Stakeholders Kunci*

Pemangku kepentingan yang paling penting adalah mereka yang memiliki otoritas dalam hubungannya dengan pembuatan kebijakan. dalam penelitian ini pemangku kepentingan penting adalah pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan industri kreatif daerah Kesultanan Serang Kota Banten

memiliki dinas pariwisata Provinsi Banten, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Dinas dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Serang Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan di Kota Serang.

3. *Stakeholders* pendukung

Dukungan pemangku kepentingan adalah pemangku kepentingan yang tidak tapi Anda langsung tertarik dengan rencananya sangat memperhatikan proses pembangunan ekonomi kegiatan kreatif di Kesultanan Banten, termasuk Forum Ekonomi Kreatif Kota Serang, LSM Institut Peduli Banten Lama dan Asosiasi Pedagang Kesultanan Banten.

Sinergi adalah interaksi sintetis antara bagian dan elemen atau orang-orang dari latar belakang yang berbeda membiarkannya menciptakan efek lebih besar dalam mencapai tujuan bersama Sinergi akan berhasil baik jika sinergi dibangun antar pemangku kepentingan dalam program atau kebijakan. Komunikasi sebagai titik pusat-pusat kekuasaan menyatu sehingga terjadi koordinasi antara Item ini kemudian akan pindah ke tindakan terorganisir (Myers & Myers to Hasan. 2019:18). Itu berarti Kunci koordinasi yang efektif adalah komunikasi (Stoner & Wankel. 1986:266). Koordinasi langsung berdasarkan pengumpulan, transmisi, dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian dari tugas-tugas yang terkoordinasi, semakin besar kebutuhan akan informasi. Untuk alasan ini, sungguh itu membantu untuk memikirkan koordinasi sebagai tugas pemrosesan informasi yang perlu.

a. Komunikasi

Untuk mencapai pertumbuhan, harus adanya sistem komunikasi untuk membangun komunikasi yang efektif dan efisien makna dapat memandu pencapaian tujuan mengembangkan. Dalam ilmu komunikasi, spesialisasi dalam penerapan teori dan konsep komunikasi khusus untuk keperluan program pembangunan yang disebut komunikasi untuk pembangunan. Menyampaikan pengembangan yang meliputi penelitian, analisis, promosi dan evaluasi teknologi komunikasi untuk semua bidang pembangunan.

b. Koordinasi

Uraian di atas menunjukkan sinergi silang kelembagaan dalam pengembangan ekonomi kreatif belum terbangun sangat jelas. Hal ini terlihat dari hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi masih berlangsung mencerminkan ego industri yang hanya melakukan tugas. Karena artinya, sinergi dalam kondisi seperti ini harus terus dibangun pengaruh kepemimpinan visioner yang kuat melalui memenuhi komitmen pimpinan daerah (khususnya gubernur dan walikota) untuk menciptakan kesadaran bersama akan pentingnya pembangunan ekonomi inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Komitmen tersebut kemudian diklarifikasi oleh kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menjadi satu rangkaian rencana kerja yang berkembang secara terus menerus. Pimpinan daerah harus memastikan pembangunan itu Ekonomi kreatif bukan hanya untuk penyelenggara bisnis ekonomi kreatif akan adil pekerjaan pemerintah daerah yang harus didukung oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Berdasarkan hasil mewawancarai informan dari berbagai bidang di empat Pameran Peralatan Daerah Provinsi Banten dan Kota Serang bahwa komitmen pemerintah daerah juga harus diikuti pada tingkat perencanaan tematik dan terpadu yang kemudian dilacak aktivitas lainnya dalam bentuk menyelenggarakan rapat

koordinasi melalui kelompok kerja (forum). komunikasi) juga berlangsung secara teratur menyusun rencana bersama yang melibatkan semua sektor.

Jadi bersatulah di awal proses perencanaan adalah apa yang dapat menghilangkan hambatan masalah psikologis sering muncul karena industri ego. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci di cabang di empat organisasi daerah di Provinsi Banten dan kota Serang sebagai pemegang polis bertanggung jawab mengembangkan ekonomi kreatif tidak dapat menunjukkan bahwa rencana pembangunan daerah, kepemilikan menentukan siapa melakukan apa.

Melaksanakan dengan baik program-program politik yang diusulkan dirumuskan oleh pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan bersama tidak dapat dipisahkan dari proses koordinasi bersama langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Ini melibatkan menerapkan prinsip koordinasi dengan kontak langsung. Masih banyak pertanyaan perlu penjelasan dan bimbingan lebih lanjut. Untuk itu, pemerintah pusat harus mendorong dan dukungan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Menerapkan prinsip penguatan koordinasi per sektor komunikasi antar pemangku kepentingan tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Jadi itu mengikuti adalah penjelasan dari beberapa kemungkinan faktor penghambat disampaikan sebagai hasil penelitian dan observasi kepada proses sinergi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kesultanan Banten, Kota Serang, diantaranya:

1. Relatif cenderung tampak euphoria berlebihan dengan tingkat otoritas itu pemberian otonomi daerah dapat menimbulkan sikap egois dalam pengelolaan daerah
2. Relatif cenderung untuk mengembangkan sikap primitivisme yang berlebihan dalam kerangka hukum mahir dalam manajemen nama domain
3. Bentuk "inisiasi" yang relatif belum ditemukan dalam bentuk konsep, desain, atau pola yang berkaitan dengan sesuatu unit pengembangan yang mengintegrasikan ruang ekonomi kreatif, baik di tingkat provinsi Banten maupun kota Serang
4. Tingkat pendidikan yang relatif rendah untuk sebagian besar masyarakat dan aktor daerah Banten mengarah pada kualitas yang buruk sumber daya manusia sektor ekonomi kreatif

SIMPULAN

Menerapkan prinsip-prinsip koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan sebagai berikut:

- 1) Koordinasi pada tahap awal; lebih sinergi dapat dicapai mudah pada tahap awal perencanaan dan produksi bijak. Tidak ada keputusan oleh instansi pemerintah manapun itu Dominasi sebagai penggerak utama tidak mengarah pada apapun Sinkronisitas dan koordinasi masih lemah dalam merencanakan program kegiatan tahunan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di tingkat provinsi dan kota. Perencanaan dilakukan hanya pada tingkat forum rencana kerja tahunan, dimana hanya beberapa perwakilan dari pemangku kepentingan yang terlibat.
- 2) Koordinasi sebagai proses yang berkelanjutan; langkah perencanaan Kegiatan program seringkali dibatasi oleh besar plafon anggaran yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan, kondisi ini berdampak langsung pada pentingnya prioritas daerah yang akan dibiayai. Terakhir, ada daerah

lain yang harus menunggu pendanaan tahun depan, kontinuitas masih dipertimbangkan merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi kreatif.

- 3) Koordinasi adalah keterkaitan semua elemen situasi; kerjasama akan berhasil jika bekerjasama yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas. terkadang terorganisir pemerintah tidak melihat pentingnya tujuannya yang diinginkan bertarung. Sinergi dicapai oleh berbagai pihak harus terikat oleh pernyataan niat yang eksplisit, tanpa Jelas, beberapa pihak mungkin tidak bisa melaksanakan tugas secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
- 4) Berkoordinasi dengan langsung menghubungi penanggung jawab yang terlibat; sejumlah organisasi pemerintah telah teridentifikasi sebagai pemangku kepentingan utama yang seharusnya memiliki peran dan fungsi seperti pelaksana pemerintahan serta pembuat kebijakan teknis di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan konsultasi UMKM belum mampu mengidentifikasi siapa dan dimana lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kurangnya akal sehat dalam konteks pendefinisian kewenangan pengembangan ekonomi kreatif antara DPO pariwisata dan DPO industri UMKM menyebabkan belum tercapainya tujuan secara memuaskan.

Komunikasi telah dilakukan antara Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan kota Serang dengan pemangku kepentingan sekunder seperti Forum Ekonomi Kreatif Provinsi Banten, Forum Ekonomi Kreatif Kota Serang, dan organisasi masyarakat secara teratur dan langsung (staf). Bentuk komunikasi ini hanya dilakukan sebagai tanggapan kelangsungan program hanya berjalan sehingga belum ada komunikasi mengacu pada sifat koordinasi formal yang terlibat pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Melalui berkat, rahmat, karunia dan mujizat-Nya, penulis mampu menulis artikel dengan judul Sinergi Birokrasi Untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Restoratif Ekonomi Kreatif di kawasan Kesultanan Banten Lama Kota Serang. Dengan selesainya artikel ini, bukanlah akhir, melainkan awal baru untuk memulai hal baru. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa ada kontributor dalam pembuatan artikel ini. Tiada kata lebih baik yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantunya. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak tergantikan yang telah meluangkan waktu, tenaga, kasih sayang serta perhatian dan bantuannya selama penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Retno Sunu dkk. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. Cetakan I*. Semarang. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.

- Azheri. Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility; Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Budi. Rayudaswati. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Makassar. Kreatakupa Print.
- Campbell. Andrew & Kathleen Sommers Luchs. 1998. *Strategic Synergy. 2nd Edition*. Boston. International Thomson Business Press.
- Covey, Stephen R. 1991. *Principles Centered Leadership*. New York. SUMMIT BOOK and colophon are trademark of Simon and Schuster Inc.
- . 2004. *The 7 Habits of Highly Effective People (Cetakan Ke-15)*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Dwiyanto. Agus. 2015. *Administrasi Publik; desentralisasi, kelembagaan, dan aparatur sipil negara*. Cetakan I. Yogyakarta. Gajah Mada University Press bekerja sama dengan LAN RI.
- Firdausy. Carunia Mulya. 2017. *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. 1 ed. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fox. Elliot M & L. Urwick. 1982. *Dynamic Administration; The Collected Papers of Mary Parker Follett. First Casebound Edition*. New York. Hippocrene Books. Inc.
- Freeman. R.E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholders Approach*. Boston. Fitm
- Hadi.Abd. Asrori. Rusman. 2021. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Cetakan Pertama. Jawa Tengah. CV. Pena Persada
- Handayani. Soewamo. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. PT Gunung Agung.
- Handoko. T. Hani. 2017. *Manajemen. Edisi 2*. BPFE-Yogyakarta.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Cetakan I. Yogyakarta. Gava Media
- Hasan. Erliana. 2019. *Komunikasi Pemerintahan. Cet ke-3*. Bandung. Refika Aditama
- Hasibuan. H. Melayu. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Keban. Yeremis, 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Latuconsina. Hudaya. 2014. *Pendidikan Kreatif, Menuju Generasi Kreatif dan Kemajuan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maksudi. Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik; Dari Klasik ke Kontemporer. Edisi I. Cetakan I*. Depok. Rajawali Pers.
- Mardikanto. Totok 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Bandung. Alfabeta
- Mawar et.al. 2020. *Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah; Konseptualisasi Program Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar*. Jakarta. UMJ Press.
- Moleong Lexy J. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pamudji, S. 1985. *Kerja Sama Antara Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah: Suatu Tinjauan Dari Segi Administrasi Negara*. Jakarta. PT. bina Aksara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tunggal. Amin Widjaja. 2008. *Dasar-dasar Customer Relationship Management (CRM)*. Jakarta. Harvarindo
-

Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, PT Gramedia, Jakarta.